

Efektivitas Dana Perguliran PNPM-MP dalam Mengembangkan Usaha Industri Rumahan di Kota Malang

Andi Asdani

^aJurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

E-mail : andiasdani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas dana perguliran PNPM – MP dalam mengembangkan usaha Industri Rumahan di Kota Malang. Peneliti melakukan kunjungan ke industry rumahan yang telah dipilih sebagai responden (yaitu 25 orang), untuk dimintai informasi tentang jenis usaha, jumlah (nominal) pembiayaan, perkembangan usaha, omzet setiap hari, keuntungan dari usaha dan lain-lain.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Dari 8 orang (30%) yang menggunakan dana perguliran untuk mengembangkan usaha rata-rata keuntungan meningkat Rp 15.000 per hari. Secara umum bantuan pembiayaan tersebut digunakan untuk “kula’an” yaitu menambah jumlah barang dagangannya. Terdapat 17 orang (70%) yang lainnya digunakan untuk membiayai sekolah anaknya, membayar hutang, biaya rumah sakit, sebagai tambahan untuk membeli barang elektronik seperti televisi, mesin cuci, kulkas dan sebagainya. Hal ini berarti industry rumahan ada yang memiliki itikat yang kurang baik dalam memanfaatkan dana perguliran ini, karena tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan, yaitu untuk mengembangkan usahanya. Tingginya jumlah dana perguliran yang tidak digunakan untuk mengembangkan usaha menandakan bahwa dana perguliran PNPM – MP belum efektif.

Kata Kunci: efektivitas, dana perguliran, usaha industry rumahan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro dan kecil memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMK tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMK dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Mengingat UMK umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMK diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki daya saing yang kuat jika UMK telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro dan kecil perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

menunjukkan bahwa UMK masih menjadi pelaku unit usaha atau 99.99% dari pelaku bisnis di Indonesia. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk bantuan permodalan bagi usaha mikro kecil seperti industry rumahan.

Permodalan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM dengan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan (Maratis, 2014). Keterbatasan modal tersebut akan mempengaruhi kinerja UMKM yaitu menurunnya kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa secara efektif, berkurangnya jumlah tenaga kerja yang mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas, pendapatan usaha menjadi rendah karena tidak ada barang yang dijual, dan efisiensi produksi yang tidak berjalan dengan baik sehingga biaya produksi menjadi tinggi. Bagi pengusaha UMKM, kredit dirasa penting untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja usahanya.

Dari segi permodalan, terdapat salah satu program PNPM = MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Masyarakat Perkotaan) yang terkait langsung dengan masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui usaha produktif adalah daya perguliran. Dana perguliran

adalah bantuan kredit yang berikan kepada industry rumahan yang yang satu ke keluarga miskin yang lainnya. Dana perguliran diberikan secara kredit, industry rumahan yang mendapatkan bantuak dana perguliran diwajibkan untuk mengembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah besarnya administrasi, jasa (jika ada), waktu angsuran. Misalnya, apabila \menerima dana perguliran Rp 1.000.000,00 maka biaya administrasi dikenakan Rp 50.000 (termasuk materai dan di bayarkan saat akan dimulai), Jika disepakati tidak ada jasa, maka ia akan mengangsur sebanyak 10 kali masing-masing Rp 100.000 setiap bulan.

Dari beberapa survey pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa industry rumahan sebagai penerima dana perguliran yang kondisi ekonomi tidak mengalami perbaikan meskipun telah mendapatkan dana perguliran tersebut. Bahkan, dana perguliran macet karena mereka tidak mampu mengangsur. Dari hasil wawancara peneliti terhadap 25 orang penerima dana perguliran, 30% menyatakan bahwa dana perguliran digunakan untuk usaha dan dapat meningkatkan pendapatan, 70% menyatakan bahwa dana perguliran tersebut tidak meningkatkan pendapatannya. Hal ini dikarenakan dana perguliran tersebut tidak digunakan untuk usaha melainkan digunakan untuk biaya yang lain, misalnya untuk biaya rumah sakit, beli alat rumah tangga, hajatan, biaya sekolah dan sebagainya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah dana perguliran yang diberikan kepada industry rumahan tersebut efektif atau tidak ?

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang efektivitas dana perguliran PNPM – MP di Kota Malang dalam sebuah penelitian yang berjudul Efektivitas Dana Perguliran PNPM – MP Dalam Mengembangkan Usaha Industri Rumahan di Kota Malang.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana efektivitas dana perguliran PNPM – MP dalam Mengembangkan Usaha Industri Rumahan di Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana perguliran PNPM – MP dalam mengembangkan usaha Industri Rumahan di Kota Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kkegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pihak PNPM – MP dalam mengevaluasi efektivitas dana perguliran.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk topik atau masalah yang sejenis.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PNPM

Program PNPM Mandiri yang diluncurkan oleh Pemerintah sesungguhnya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja melalui konsolidasi programprogram pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga. Yang menjadi ciri khas dari PNPM Mandiri yaitu program ini melakukan penyaluran pendanaan operasional ke kegiatan secara langsung ke masyarakat tidak melalui Pemerintah Daerah. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM – MP), merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1999 sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

PNPM Mandiri Perkotaan dinaungi oleh masing - masing Kelurahan, yang bernama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Badan tersebut memberikan pinjaman dana kepada organisasi yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk dan beranggotakan masyarakat penerima dana.

Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini

sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

2.2 Kredit

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Menurut Kasmir (2008:92-93):Kredit adalah pinjaman yang dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya Bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah penyediaan dana oleh bank yang nantinya akan disalurkan atau dipinjamkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga.

"Tujuan kredit adalah tercapainya unsur *profitability* dan *safety* dari suatu kredit" (Suyatno, 1997:14-15). Profitability merupakan keuntungan dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima atau untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diambil dari pemungutan bunga. Sedangkan yang dimaksud dengan *safety* adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam uang, barang atau jasa betul-betul terjamin pengembaliannya atau keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga dari profitabilitas dapat tercapai. Dari dua tujuan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan kredit adalah :

- a) Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan

- b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

2.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memilikihasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-

2.4 Dana Peguliran

Program PNPM Mandiri Perkotaan memberikan pinjaman dalam bentuk Dana Bergulir. Tujuan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin adalah untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui KSM hanya merupakan salah satu upaya dalam program PNPM Mandiri Perkotaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. Program PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternatif kegiatan pinjaman

bergulir berupa modal kemudian masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah akan menggunakan kegiatan pemberian pinjaman bergulir dalam program penanggulangan kemiskinannya. Penetapan kegiatan pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin diputuskan sendiri oleh masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Dana perguliran merupakan salah satu program kegiatan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin. BKM menunjuk satu unit pengelola yang disebut UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang bertugas secara khusus menangani dana perguliran tersebut. Hal ini berarti bahwa UPK-BKM sebagai pengelola harus mampu mengikuti sistem pengelolaan pinjaman bergulir yang standar sebagaimana diuraikan dalam pedoman teknis ini, disamping pedoman khusus pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK-BKM yang akan disusun secara tersendiri.

Kelompok sasaran untuk program pinjaman bergulir adalah rumah tangga atau keluarga miskin yang :

1. Akan memulai usaha baru dan / atau sudah mempunyai usaha mikro yang layak dikembangkan dan memberikan kontribusi secara langsung bagi penciptaan peluang usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin di wilayahnya;
2. Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-, sedangkan selanjutnya dapat bertambah sesuai dengan kemampuan UPK,-. Bagi peminjam yang nilai pinjaman per individunya cukup besar dan tidak dapat dilayani oleh keuangan UPK, didorong untuk memperoleh akses ke sumber/lembaga keuangan formal di sekitarnya;
3. Memiliki motivasi dan tanggungjawab tinggi untuk mengembalikan pinjamannya.
4. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan.

Sebagai salah satu pilihan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, tujuan program pinjaman bergulir dapat dirumuskan :

1. Mendorong proses pembelajaran masyarakat miskin dalam menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, maupun kegiatan yang bersifat produktif lainnya;
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan dan/atau relatif berpendapatan

sangat rendah yang merupakan kelompok sasaran utama P2KP;

3. Membuka akses bagi usaha mikro dan para pengusaha mikro yang selama ini tidak mendapatkan akses dan belum terjangkau oleh pelayanan lembaga keuangan formal yang sudah ada, sebagai upaya untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat miskin setempat;
4. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umum P2KP yakni membantu upaya penanggulangan kemiskinan, melalui kegiatan pinjaman bergulir.
5. Mengurangi kesenjangan (*gap*) antara sisi penawaran (*supply side*) yang terbatas dengan sisi permintaan (*demand side*) yang masih belum dapat dilayani secara keseluruhan, khususnya oleh lembaga keuangan formal

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang bersifat studi kasus. Menurut Suryabrata (1997:22) penelitian studi kasus adalah: "Penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik organisasi tersebut".

3.2 Metode pelaksanaan

Peneliti juga melakukan kunjungan ke industry rumahan yang telah dipilih sebagai responden (yaitu 25 orang), untuk dimintai informasi tentang jenis usaha, jumlah (nominal) pembiayaan, perkembangan usaha, omzet setiap hari, keuntungan dari usaha dan lain-lain

3.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi industry rumahan dan mengamati kegiatan mereka sehari-hari.
- b. Wawancara (interview) dilakukan kepada 25 industry rumahan untuk mengetahui omzet penjualan, jumlah pendapatan maupun keuntungan dari masing-masing industry rumahan .
- c. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan-laporan, prosedur perguliran, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, data industry rumahan dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Matt Holand, analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung

terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data. Proses tersebut diuraikan dalam beberapa teknik analisis data kualitatif, meliputi:

- a. Pendekatan umum analisis data kualitatif, yaitu induktif pada awalnya, namun menjadi deduktif pada tahap selanjutnya.
- b. Menyusun data sebelum menganalisisnya.
- c. Melakukan koding (*coding*) dan kategorisasi bukti.
- d. Menemukan pola dan proposisi kerja.
- e. Menafsirkan data
- f. Mengevaluasi penafsiran peneliti dan menunjukkan validitas serta reabilitasnya.
- g. Beberapa isu analisis khusus, meliputi analisis berbagai sumber, dokumen, catatan lapangan dan analisis sekunder.

Ada bermacam – macam cara analisa yang dapat diikuti untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini analisis yang dipakai mengikuti langkah – langkah dari Nasution, yaitu:

Reduksi Data, laporan – laporan dari lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan atau dirangkum, direduksi, disusun lebih sistematis, difokuskan pokok – pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah dikendalikan dan mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

Display data, display data ini membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian – bagian tertentu dari data hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat matrik untuk data, agar peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi, sejak semula peneliti berusaha mencari makna data yang tergalai atau terkumpul. Untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan. Hal – hal yang sering timbul dan sebagainya. Dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini mula – mula masih kabur, sangat tentative, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data makan kesimpulan itu seakan lebih “grounded”. Jadi kesimpulannya harus senantiasa diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan temuan merupakan usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuan. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitas dengan menggunakan teknik – teknik perpanjangan

kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, dan pelacakan kesesuaian hasil. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain (*transferability*), ketergantungan pada konteksnya (*dependability*), dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (*confirmability*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah 25 orang dengan pertimbangan selain keterbatasan waktu dan tenaga karena peneliti harus mendatangi atau mengunjungi industry rumahan tersebut ke tempat usaha masing-masing guna melakukan pengamatan maupun wawancara.

Data industry rumahan dan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Prosentase
1	Laundry	3	12%
2	Jual kue (jajan pasar)	4	16%
3	Jual sembako	1	4%
4	Jual nasi goreng	1	4%
5	Jual sate	1	4%
6	Jual LPG	1	4%
7	Jual sayur	1	4%
8	Warung nasi	1	4%
9	Penjahit	3	12%
10	Jual nasi jagung, botok,	4	16%
11	lauk	1	4%
12	Jual tahu	1	4%
13	Tambal ban	1	4%
14	Potong rambut	1	4%
15	Toko	1	4%
	Jual kripik tempe		
Total		25	100%

Dari hasil survey ditemukan bahwa dana perguliran tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk tambahan modal usaha seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Penggunaan Dana Perguliran

Jenis Penggunaan	Jumlah industry rumahan	Prosentase
Tambahan modal	8	30%
Kebutuhan yang lain:	4	70%
Biaya sekolah	3	
Bayar hutang	4	
Biaya rumah sakit	6	
Tambahan membeli rumah tangga		
Jumlah	25	100%

Sumber: Hasil wawancara dengan industry rumahan .

Dari 8 orang (30%) yang menggunakan dana perguliran untuk mengembangkan usaha rata-rata keuntungan meningkat Rp 15.000 per hari. Secara umum bantuan pembiayaan tersebut digunakan untuk “kula’an” yaitu menambah jumlah barang dagangannya.

Terdapat 17 orang (70%) yang lainnya digunakan untuk membiayai sekolah anaknya, membayar hutang, biaya rumah sakit, sebagai tambahan untuk membeli barang elektronik seperti televisi, mesin cuci, kulkas dan sebagainya. Hal ini berarti industry rumahan ada yang memiliki itikat yang kurang baik dalam memanfaatkan dana perguliran ini, karena tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan, yaitu untuk mengembangkan usahanya.

Tingginya jumlah dana perguliran yang tidak digunakan untuk mengembangkan usaha menandakan bahwa dana perguliran PNPM – MP masih belum efektif. Selain itu, dari data yang ada ternyata peningkatan pendapatan yang diperoleh industry rumahan yang mengembangkan usaha hanya meningkat Rp 15.000 ribu per harinya.

Dilihat dari omzet penjualan, tidak terjadi peningkatan pendapatan meskipun telah diberikan dana perguliran. Berdasar interview dengan industry rumahan, dana perguliran tersebut sebagian besar tidak digunakan untuk menambah modal usaha, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, seperti membiayai sekolah anaknya, membayar hutang, biaya rumah sakit, sebagai tambahan untuk membeli barang elektronik seperti televisi, mesin cuci, kulkas dan sebagainya (sebagian besar debitor yaitu 70% menggunakan bantuan pembiayaan tersebut untuk kebutuhan yang lain (tidak digunakan untuk tambahan modal usaha).

Penyebab tidak efektifnya dana perguliran tersebut: (1) dana perguliran tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, (2) pengelola dana perguliran tidak melakukan survey dan hanya berdasarkan wawancara (kepercayaan saja) untuk memastikan apakah industry rumahan memiliki usaha atau tidak, (3) pengelola dana perguliran tidak melakukan pengawasan terhadap industry rumahan setelah mendapatkan dana, (4) pengelola dana perguliran tidak melakukan pembinaan untuk memaksimalkan penggunaan dana perguliran dalam mengembangkan usaha.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dana perguliran lebih efektif dalam meningkatkan usaha industry rumahan di Kota Malang, maka:

- (1) Diperlukan survey terhadap industry rumahan, untuk mengetahui usaha apa yang telah dilakukan industry rumahan. Jika belum memiliki usaha, dapat diidentifikasi ketrampilan atau kemampuan apa yang dapat dikembangkan agar dapat melakukan usaha. Setelah itu, diberikan dana perguliran sebagai modal usaha.
- (2) Diperlukan pengawasan terhadap industry rumahan yang memperoleh dana perguliran, apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha? dan bagaimana upaya industry rumahan tersebut dalam menjalankan usahanya setiap hari.
- (3) Diperlukan pembinaan bagi industry rumahan yang mengalami permasalahan dalam usaha sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar. Pembinaan dapat dilakukan baik dalam mengembangkan usaha maupun dalam mengelola keuangan.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka pengelola dana perguliran perlu melakukan kerjasama dengan relawan yang bertugas untuk mengawasi dan mendampingi sekaligus melakukan pembinaan terhadap industry rumahan, baik dari lingkungan akademis (mahasiswa) maupun relawan dari warga masyarakat setempat. Dengan kerjasama ini diharapkan dana perguliran dapat tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan industry rumahan.

REFERENSI

- [1]. Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi 2008
- [2]. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang
- [3]. Keputusan Menko Kesra No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
- [4]. Maratis Suhartini, Atik, Ropika Yuta. 2014. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Serta Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (7)2 Agustus 2014*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- [5]. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

-
- [6]. Pokok-Pokok Pikiran Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Arie Sujito, www.Pergerakan-Indonesia.org, 07 Maret 2011.
- [7]. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- www.pnpm-mandiri.org;
 - www.p2kp.org;
 - <http://tkpkri.org>;
- http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan;
 - www.bappenas.go.id;
 - www.p2dtk.bappenas.go.id;
 - <http://www.kabarindonesia.com>;
 - www.Pergerakan-Indonesia.org.